



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KOTA TOMOHON TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No .	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,29	80,06	0,97%
2.	Angka Kemiskinan	5,60	5,38	-3,93%
3.	Angka Pengangguran	8,52	7,79	-8,57%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,32	4,74	-10,90%
5.	Pendapatan per Kapita	49.770.593,00	56.625.488,00	13,77%
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,339	0,364	7,37%

Sumber : BAPELITBANGDA dan BPS Kota Tomohon, 2024

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

2.1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	81,07%	86,13%
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,10%	91,50%
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	118,03%	84,96%



1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	47,62%	61,29%
-------	---	--------	--------

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	34.062.907.700	29.913.143.688
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16.915.632.900	15.018.367.503
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.012.000.000	1.967.100.000
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	140.000.000	139.250.000
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	320.354.000	311.898.970
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	542.668.100	507.920.000
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.769.085.700	1.160.502.989
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	235.284.400	103.732.200
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	349.107.100	288.237.720
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.461.320.000	7.554.944.124
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.102.200	37.823.000
10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.816.400	1.744.500
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.895.000	300.067.000



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.740.000.000	2.645.147.000
B	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.448.799.800	12.468.414.291
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	450.000.000	421.087.500
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	295.425.000	292.700.000
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.560.000.000	2.529.500.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.708.264.000	1.671.110.825
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	228.973.000	227.700.000
6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.007.665.200	1.162.609.494
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	189.862.000	84.772.754
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	289.370.600	246.333.636
9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.689.250.000	5.802.887.082
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.990.000	29.713.000
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.445.713.800	2.217.461.894
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	163.065.000	162.800.000
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	127.630.000	127.590.000
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	252.927.300	183.880.940
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	902.059.700	787.780.354
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	943.200.000	933.750.600
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.831.800	21.660.000
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	252.761.200	208.900.000
1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	243.280.000	208.900.000
2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.481.200	-
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.791.782.793	7.070.309.369
A	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.791.782.793	7.070.309.369



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	2	3	4
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.791.782.793	7.070.309.369

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap pengumpulan data, data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
Solusi : Ke depan pendataan harus bernasis kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional
2. Pada tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar terdapat beberapa masalah :
 - Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat.
Solusi : Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk katersediaan data yang valid dan akuntabel.
 - Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah.
Solusi : Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan
 - Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala.
Solusi : Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.
3. Pada tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar terdapat masalah yaitu belum maksimalnya data yang tersedia.
 - Solusi : Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi.



2.2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4,76	4,71
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	96,18
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	99,80
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	63,63	95,95
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,54	97,68
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	108,49	140,32

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :



	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	112.934.427.048,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.280.448.048,00
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.047.643.808,53
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.047.643.808,53
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.417.130,47
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.449.430,47
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.061.700,00
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.400.000,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.506.000,00
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.942.397.959,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.169.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.834.228.959,00
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.989.150,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.989.150,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.024.698.000,00
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.987.174.200,00
1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	35.658.119.072,00
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.254.451.928,00
3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan	2.074.603.200,00
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.987.523.800,00
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	233.206.800,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	48.750.000,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	127.705.300,00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00
5	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	126.475.400,00
6	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	49.050.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	277.081.800,00



	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
8	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.854.646.000,00
9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00
10	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.120.608.500,00
C	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000,00</i>
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	320.901.000,00
A	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>320.901.000,00</i>
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	320.901.000,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.308.380.000,00
A	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.308.380.000,00</i>
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.308.380.000,00

C. Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pencapaian target indikator tahun 2024 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Tomohon meliputi :

- Keterbatasan anggaran dalam menunjang pelayanan kesehatan
- Tata kelola manajemen pelayanan belum optimal
- SDM kesehatan yang belum menunjang

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Tomohon pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Pendistribusian tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kota Tomohon.
2. Peningkatan kapasitas dan tanggungjawab petugas kesehatan dalam mengelola dan melaporkan kegiatan yang dilakukan.
3. Optimalisasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan.
4. Advokasi ke pemangku jabatan Pemerintah Kota Tomohon dalam rangka peningkatan anggaran daerah dibidang kesehatan.



2.3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	100%
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	100%
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,48%	63,64
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	49,92%	50,58%
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,70%	94,12%
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0%	100%
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,56%	72,88%
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	28,26%	45,45%
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	83,33%



B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	KOTA TOMOHON		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K20230131033558	
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan Perkotaan
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan Perdesaan
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan Perkotaan
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan Perdesaan
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerkotaan
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerkotaan
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestikdalam daerah Kabupaten/Kota
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik terpusat skala Kota
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT

NO	PENDANAAN	PAGU
1	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON	716.195.828.268
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3.013.374.000

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat kebocoran air akibat kerusakan jaringan perpipaan infrastrukturair minum yang terbangun telah lama dengan usia produktivitas yang menurun.
2. Maraknya pencurian air oleh masyarakat yang mengakibatkan daerah aliran air tidak bekerja secara maksimal dengan tingkat kebocoran hingga 30 % – 40 %.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat (people’s behavior) tentang infrastruktur air bersih hal ini terlihat dengan maraknya penebangan pohon serta membuang sampah secara sembarangan di daerah resapan air.
4. Menyesuaikan Kemampuan keuangan Daerah dalam menunjang program kegiatan infrastruktur air bersih. Kemampuan pencapaian keterlaksanaan setiap kegiatan tentunya tidak lepas dengan ketersediaan dana.



Sedangkan permasalahan di sektor air limbah :

- 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan *septic tank* yang memenuhi spesifikasi dan persyaratan dan melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal;
- 2. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan air limbah belum dianggap sebagai infrastruktur yang menjadi prioritas oleh masyarakat, sehingga usulan-usulan untuk kegiatan air limbah secara *bottom up* belum optimal;
- 3. Menyesuaikan Kemampuan keuangan Daerah dalam menunjang program kegiatan infrastruktur air bersih. Kemampuan pencapaian keterlaksanaan setiap kegiatan tentunya tidak lepas dengan ketersediaan dana.

Adapun Solusi dan tindak lanjut dari permasalahan :

- 1. Perlu adanya biaya pemeliharaan jaringan perpipaan infrastruktur air minum dan air limbah.
- 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan infrastruktur jaringanPerpipaan baik air minum maupun air limbah.
- 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian lingkungan dalam upayamenyimpan cadangan air.
- 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara terjadwal melakukan penyedotan lumpur tinja.
- 5. Mengoptimalkan pemanfaatan IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja) KotaTomohon agar layanan penyedotan lumpur tinja secra terjadwal dapat terlaksana.
- 6. Memberi usulan kepada pimpinan dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih dan air limbah dengan penambahan alokasi dana program dan kegiatan.

2.4. Urusan Perumahan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0



1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	0,26
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,29	4,25
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,46	11,23

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja urusan perumahan yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh rumah layak huni	1. Program Kawasan Permukiman	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Tomohon
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN/ PAGU (RP)
1	Program Pengembangan Perumahan	13.225.459
1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.187.059

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan di Kota Tomohon antara lain :

a) Kependudukan

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Tomohon Tahun 2024 yakni 103.213 jiwa dan jumlah rumah tangga 34.050 dengan tingkat kepemilikan rumah sebesar 25.075 KK yang artinya terdapat 8.975 unit rumah yang harus ada sehingga pengaruh pertambahan penduduk sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan untuk kepemilikan rumah, belum lagi laju urbanisasi yang turut memberikan dampak signifikan bagi perkembangan terhadap laju kepadatan penduduk Kota Tomohon.

b) Konsep RTRW

Penataan ruang yang merupakan konsep awal atas alokasi penempatan dan peruntukan ruang wilayah suatu kota juga akan memberikan sumbangsih pemerataan penyebaran kependudukan dan pemerataan dalam Pembangunan yang dilakukan oleh Kota Tomohon. Pesatnya Pembangunan perumahan di Kota Tomohon bila tidak dikontrol dengan baik akan menjadi boomerang bagi Kota Tomohon dan ini akan menyebabkan keadaan Kota Tomohon semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

c) Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perencanaan merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari satuan system dalam peraturan tersebut, dengan perencanaan yang matang, sinergitas dan terintegrasi dalam setiap sektor akan menghasilkan output pengembangan perumahan dan permukiman yang unggul. Belum optimalnya perencanaan berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpeng tindihnya rencana aksi pengembangan antar lini dan tidak terfokusnya prioritas pengembangan dan pemenuhan perumahan rakyat dan kawasdan



pemukiman. Konsep perencanaan yang terintegrasi yang salah satunya adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah, dokumen data base kampung kumuh, sinkronisasi program untuk pencapaian target 100-0-100 % yaitu 100 % akses air minum, 0 % Kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi yang mengakomodasi perkembangan wilayah, perkembangan permukiman yang semakin insetif tetapi tetap memperhatikan lingkungan yang keberlanjutan (*sustainable development*). Dengan adanya dokumen-dokumen pendukung tersebut, diharapkan arah kebijakan pengembangan/*developmet policy* tentang perumahan dan permukiman dapat menumbuhkan lingkungan hidup perumahan yang lebih sehat dan terkendali serta terintegrasi.

d) Sarana dan Prasarana

Ketika berbicara masalah sarana dan prasarana maka akan berhadapan dengan Pembangunan fisik, konsep perencanaan sarana dan prasarana perumahan juga harus terintegrasi secara baik sesuai dengan peruntukan dengan menghadirkan fasilitas – fasilitas yang mengikuti konsep green city dan smart city yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota Tomohon tanpa mengurangi nilai dari Kawasan perumahan dan permukiman tersebut.

e) Lahan Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah yang mulai tidak bisa dijangkau oleh Masyarakat golongan lemah dan pemerintah kota karena semakin tidak logisnya harga tanah tersebut. Dengan luasan kota memberikan konflik di bidang agrarian karena sedikitnya lahan dan tidak sedikit areal atau area yang peruntukannya untuk ruang terbuka hijau yang disulap menjadi kawasan permukiman karena lemahnya regulasi agraria, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah sebagai Kawasan perumahan dan permukiman ini menyebabkan menurun dan terganggunya kualitas ekosistem.

f) Pembiayaan

Secara mikro pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2016 menjadi salah satu faktor penentu karena aturan perbankan akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomis Masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang layak bagi mereka masih sangat lemah karena Sebagian besar masyarakat



merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah sedangkan secara makro hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan ekonomi nasional untuk mendukung pemecahan masalah perumahan secara menyeluruh.

g) Teknologi konstruksi

Penguasaan teknologi konstruksi faktor pendukung program Pembangunan perumahan rakyat ini adalah ketersediaan bahan bangunan dan distribusinya yang erat kaitannya dengan harga serta kemampuan sumber daya konstruksi untuk penjaminan mutu konstruksi sehingga konstruksi sesuai dengan harapan baik kualitas maupun kuantitas pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman.

h) Kelembagaan

Kelembagaan dibidang perumahan merupakan suatu kesatuan sistem kelembagaan untuk mewujudkan Pembangunan perumahan secara terencana, terarah dan terintegrasi baik itu yang berfungsi sebagai pemegang kenijaksanaan, pembinaan dan pengaturan maupun regulasi pada berbagai level pemerintahan maupun Lembaga dan rekanan pelaksana Pembangunan di sektor perumahan.

i) Peran dan Dukungan Masyarakat

Peran serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari hasil Pembangunan perumahan memberikan dampak positif dalam pemenuhan Pembangunan perumahan disamping itu pemenuhan Pembangunan perumahan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, baik itu perorangan maupun secara bersama-sama sedangkan peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur, Pembina dan membantu serta menciptakan kondisi yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan perumahan mereka. Masyarakat yang aktif akan menjadi *agent of change* dari program pemerintah dalam pemenuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

j) Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan baik ditingkat pemerintah pusat sampai pada peraturan daerah harus terintegrasi secara baik agar arah dan tujuan pemenuhan perumahan bagi masyarakat dan pemenuhan kawasan permukiman dapat berjalan dengan baik.

Adapun Solusi dan tindak lanjut yang diperlukan :

- Koordinasi penganggaran dengan Pusat/Provinsi/Kota
- Tingkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah



- Penetapan regulasi pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan semua stakeholder.

2.5. Urusan Trantibum Linmas

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	60,48	142,13
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	49,92	0,94
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,70	0
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	100
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	86,56	6,33

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Umum

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu)	Pencegahan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	14.312.193.132	14.207.725.214	104,467,918



NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
	Daerah Kabupaten/Kota	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Partroli, Pengamanan dan Pengawasan			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	-	-
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30.000.000	30.000.000	-
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tenik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.000.000	66.000.000	-
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
Non Kebakaran

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200.000.000	181.954.800	18.045.200



NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
	Pencegahan Kebakaran	Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			

Kebencanaan

NO	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran
	Program Penanggulangan Bencana	817.122.900
I	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	34.041.600
1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	34.041.600
II	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	729.553.300
1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	59.614.600
2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	623.611.600
3	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	46.327.100
III	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	53,528.000
1	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	16.500.000
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat	37.028.000

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
Solusi : Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional
2. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
Solusi : Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;
3. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
Solusi : Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
4. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.



Solusi : Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

5. Permasalahan Bidang Damkar

Terbatasnya alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan, terbatasnya personil pemadam

Solusi : Penambahan pagu anggaran khusus operasional pemadam kebakaran, Perlu adanya regulasi pembentukan Dinas Damkar Dan Penyelamatan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri NO 16 Tahun 2020 pasal 4 ayat 4, yang berbunyi pembentukan dinas Damkar dan penyelamatan Provinsi Dan kabupaten kota yang tidak memenuhi perhitungan pembentukan suatu dinas, tetap di bentuk dinas Damkar tipe C.

Permasalahan Bidang BPBD/Kebencanaan

Sampai dengan sekarang ini permasalahan yang ditemui yaitu kurangnya personil yang terlatih, kurangnya peralatan yang memadai serta kurangnya anggran. Dan BPBD Kota Tomohon tetap memberdayakan setiap potensi termasuk dana anggran yang tersedia semaksimal mungkin sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

2.6.URUSAN SOSIAL

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	27,77
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	0



B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Tomohon pada tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN/ PAGU (RP)	REALISASI	%
1	Program Perberdayaan Sosial			
1.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	412.831.200.00	388.153.758.00	94
2	Program Rehabilitasi Sosial			
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	644.223.400.00	641.568.400.00	99
2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	49.794.000.00	49.794.000.00	100
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
3.1	Pengelolaan Data fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/kota	6.147.858.800.00	3.600.454.576.00	59
4	Program Penanganan Bencana			
4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten dan Kota	325.101.750.00	298.506.120.00	92

C. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Tomohon, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Tomohon dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tomohon serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tomohon, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan



sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal. Permasalahan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon difokuskan pada :

1. Kemiskinan
2. Korban Bencana
3. Ketelantaran
4. Penyandang Disabilitas
5. Korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
6. Penduduk yang termajinalkan

Arah kebijakan penanganan permasalahan sosial meliputi : perlindungan sosial, pelayanan dasar, peningkatan penghidupan berkelanjutan. Intervensi sosial yang dilakukan untuk menangani permasalahan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial. Penanganan permasalahan sosial dilaksanakan untuk menuju Indonesia Sejahtera melalui solusi sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan)
2. Pengakuan terhadap hak dasar
3. Perlindungan rasa aman dari berbagai resiko (bencana sosial, bencana alam)
4. Penyediaan akses sarana dan prasarana
5. Menjamin kelangsungan hidup

3. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun 2024. Realisasi pendapatan Kota Tomohon 96,97% dan Realisasi Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 mencapai 95,67%

Secara rinci, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut: *(halaman selanjutnya)*



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)
4	PENDAPATAN	722,903,035,428.00	701,016,924,573.16	96.97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73,293,699,632.00	56,685,242,697.16	77.34
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	38,987,848,033.00	32,408,637,666.50	83.12
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8,573,395,600.00	2,817,579,468.00	32.86
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,680,085,246.00	2,680,085,246.00	100.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23,052,370,753.00	18,778,940,316.66	81.46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	638,546,775,796.00	636,340,326,806.00	99.65
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	599,136,372,470.00	595,042,142,514.00	99.32
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	45,875,718,470.00	45,706,665,000.00	99.63
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	424,708,690,000.00	424,328,577,685.00	99.91
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	128,551,964,000.00	125,006,899,829.00	97.24
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	12,933,346,000.00	12,933,346,000.00	100.00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	12,933,346,000.00	12,933,346,000.00	100.00
4.2.03	Transfer Pemerintah Provinsi	26,477,057,326.00	28,364,838,292.00	107.13
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26,477,057,326.00	28,364,838,292.00	107.13
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11,062,560,000.00	7,991,355,070.00	72.24
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0
4.3.03	Pendapatan Lainnya	11,062,560,000.00	7,991,355,070.00	72.24
5	BELANJA	723,208,152,807.00	691,865,347,875.32	95.67
5.1	BELANJA OPERASI	636,379,050,120.80	609,186,900,465.32	95.73
5.1.01	Belanja Pegawai	298,074,309,013.60	294,191,910,833.00	98.70
5.1.02	Belanja Barang	280,007,876,508.37	260,092,565,976.32	92.89
5.1.03	Belanja Bunga	5,750,654,740.00	5,750,485,843.00	100.00



5.1.05	Belanja Hibah	45,801,208,858.83	45,015,937,813.00	98.29
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,745,001,000.00	4,136,000,000.00	61.32
5.2	BELANJA MODAL	81,235,588,018.25	78,188,447,410.00	96.25
5.2.01	Belanja Tanah	0.00	0.00	0
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	7,984,618,986.25	7,364,439,874.00	92.23
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	46,954,850,518.00	45,044,739,743.00	95.93
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25,618,579,314.00	25,092,690,093.00	97.95
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	527,539,200.00	536,827,700.00	101.76
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	150,000,000.00	149,750,000.00	99.83
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5,593,514,667.95	4,490,000,000.00	80.27
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5,593,514,667.95	4,490,000,000.00	80.27
	SURPLUS / DEFISIT	(305,117,379.00)	9,151,576,697.84	0
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20,864,208,679.00	20,864,208,679.00	100.00
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	20,864,208,679.00	20,864,208,679.00	100.00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,559,091,300.00	20,559,091,300.00	100.00
7.2.02.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	100.00
7.2.03	Pembayaran Pokok Utang	16,559,091,300.00	16,559,091,300.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	305,117,379.00	305,117,379.00	100.00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	9,456,694,076.84	0



4. INOVASI DAERAH

Berdasarkan database inovasi daerah, Kota Tomohon memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	1. AYAH SAYANG BUAH HATI (Puskesmas Kakaskasen) 2. PRETTY-PREGNANCY TEETH AND YOU (Puskesmas Matani) 3. LANSIA TALK (Puskesmas Matani) 4. OOTD (OBROLAN ONLINE SEHAT DAN BERMANFAAT) (Puskesmas Matani) 5. INOVASI RUMAH GIZI (Puskesmas Matani)	1. AYAH SAYANG BUAH HATI merupakan inovasi untuk mencegah terjadinya masalah gizi pada anak yang dimana sasaran dari inovasi ini adalah para ayah yang memiliki balita 0-2 tahun. 2. PRETTY-PREGNANCY TEETH AND YOU dibuat untuk pemeriksaan ibu hamil terkait pembentukan struktur gigi dan janin. 3. LANSIA TALK ialah layanan konsultasi kesehatan secara online melalui video call ke Lansia. 4. OOTD (OBROLAN ONLINE SEHAT DAN BERMANFAAT) berupa sharing informasi kesehatan yang dikemas santai dari sumber yang terpercaya. 5. INOVASI RUMAH GIZI merupakan inovasi lewat pemberian makanan tambahan, suplemen kesehatan, dan pemeriksaan untuk pencegahan stunting. 6. HOSPITAL WITHOUT WALL merupakan



		6. HOSPITAL WITHOUT WALL (RSUD Anugerah Tomohon)	layanan antar jemput pasien, layanan ke rumah secara langsung
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINDUK 2. SIAMO-E (SISTEM APLIKASI MASYARAKAT ELEKTRONIK) (Kelurahan Walian)	1. PELAYANAN LANGSUNG DI LAPAS ANAK KOLONAN DAN BIARA KARMELE KAKASKASEN YANG ADA DI KOTA TOMOHON 2. SIAMO-E (SISTEM APLIKASI MASYARAKAT OTOMAT ELEKTRONIK) digunakan untuk pengurusan administrasi kelurahan secara elektronik.
3.	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon	PALAKAT TOU'MUUNG	PALAKAT TOU'MUUNG merupakan sistem pelayanan pajak secara digital
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Tomohon	SIMPATI HEBAT (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG HUMANIS, EMPATI, BERINTEGRASI, AKUNTABEL DAN TULUS)	SIMPATI HEBAT (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG HUMANIS, EMPATI, BERINTEGRASI, AKUNTABEL DAN TULUS) adalah sistem pelayanan administrasi terkait pengurusan pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, dll)
5.	Dinas Lingkungan Hidup	PEMBUATAN STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA) / AIR QUALITY MONITORING SYSTEM (AQMS)	PEMBUATAN STASIUN PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN (SPKUA) / AIR QUALITY MONITORING SYSTEM (AQMS) merupakan infrastruktur untuk memantau tingkat kualitas udara secara otomatis, kontinu dan real time (24 jam) di Kota



			Tomohon.
6.	Dinas Lingkungan Hidup	PEMBUATAN ONLIMO (ONLINE MONITORING SYSTEM)	PEMBUATAN ONLIMO (ONLINE MONITORING SYSTEM) adalah sistem pemantauan kualitas air yang dioperasikan secara otomatis, kontinu dan daring (online). ONLIMO memiliki parameter untuk mengukur dan memantau tingkat air di perairan. Parameter yang diukur adalah : Temperatur (Suhu), pH (Derajat Keasaman), DO, BOD, COD, TDS, Kedalaman, Amoniak, Nitrit, Nitrat, ORP (banyaknya oksigen dalam air), TSS, Turbidity).